

WILLINGNESS TO PAY (WTP) MAHASISWA EKONOMI UNTUK MENGURANGI TINGKAT KRIMINALITAS DI KAMPUS FE UNY

Bambang Suprayitno, Tejo Nurseto, Ngadiyono

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia

bambang_s@uny.ac.id, tejo@uny.ac.id, ngadiyono@uny.ac.id

Abstrak: Besaran *Willingness to Pay* (WTP) berguna untuk dijadikan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan WTP mahasiswa FE UNY dalam rangka mengurangi tindak kejahatan berupa apakah itu berupa *property crime* maupun *non-property crime* di kampus serta untuk mengeksplorasi keamanan di kampus dari 300 sampel mahasiswa diperoleh dengan *purposive proportional sampling* di Kampus FE UNY Karang Malang. Dengan *Contingent Valuation Method*, penelitian ini berusaha mendapatkan kemampuan membayar para responden. Metode yang digunakan dengan pendekatan ekonometrika serta analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WTP mahasiswa FE UNY secara rata-rata sebesar Rp106.4rb, di mana WTP mahasiswa prodi P.ADP adalah yang terbesar. Berbagai faktor yang mempengaruhi WTP adalah pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan kepala keluarga, status sebagai korban dan pelaku kriminalitas jika dilakukan oleh pegawai, kerusakan fisik, serta tingkat ketaatan ketika biaya kriminalitas menjadi pajak serta tindakan nyata untuk mengantisipasi kejahatan. Artinya mahasiswa mempunyai komitmen yang tinggi dalam menanggung biaya agar kriminalitas berkurang di FE UNY.

Kata Kunci: Keamanan Kampus, Property Crime, Contingent Valuation Method

WILLINGNESS TO PAY (WTP) ECONOMIC STUDENTS TO REDUCE THE LEVEL OF CRIMINALITY IN CAMPUS

Abstract: The amount of Willingness to Pay (WTP) is useful as a consideration for policy decision. This study aims to obtain WTP of Faculty of Economics's students for reducing property crime and non-property crime on campus and to explore campus security from 300 student samples through purposive proportional sampling in Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) campus. Utilizing Contingent Valuation Method, this research is carried out to obtain the ability to pay the respondents. The econometric approach and descriptive statistical analysis is carried out to achieve the purpose. On the average, the student's WTP is Rp106,400 where the students of the P.ADP study program has the largest one. Various factors that influence the level of WTP are family income and education level of the head of the family, the status of victims and criminals if carried out by employees, physical damage, and the level of obedience when the costs of crime become tax and concrete actions to anticipate crime. This means that students have a high commitment to provide the fund for reducing the crime in UNY campus.

Keywords: Campus Security, Property Crime, Contingent Valuation Method

PENDAHULUAN

Kita masih ingat bagaimana mahasiswa Indonesia meninggal dengan dugaan bunuh diri dengan berbagai misteri yang ada di kampus NTU di Singapura ("Jeritan Mahasiswa Indonesia Di Singapura," 2009). Mahasiswa UI juga ada yang meninggal dengan tas berisi batu bata yang diduga sebagai pemberat agar mayat korban tenggelam (Indrawan, 2015). Dan yang tidak lupa

dari ingatan kita, berulang kali adanya mahasiswa yang meninggal akibat perpeloncoan di kampus STPDN atau IPDN. Banyaknya drama pembunuhan dengan senjata api di sekolah-sekolah dan kampus di US, di mana hal ini yang menjadikan keprihatinan bagi Presiden Obama akibat maraknya penggunaan senjata api karena dilegalkan. Ini artinya, keamanan di dalam proses belajar di sekolah atau kampus masih menjadi masalah.

Banyaknya tindak kejahatan mempengaruhi pencapaian mahasiswa dalam pembelajaran. (Burdick-Will, 2013) menemukan pengaruh negatif dari tingkat kejahatan yang terjadi memiliki negatif efek pada skor hasil tes meski tidak pada nilai. (Lacoe, 2020) juga menunjukkan hal serupa pada penelitian sebelumnya, rasa tak aman yang dimiliki oleh pelajar memberikan efek negatif terhadap skor tes. (Schunk, 2012) lebih tegas lagi menyatakan bahwa kriminalitas dan kekerasan yang ada mengakibatkan prestasi pelajar menjadi menurun.

Tuntutan kampus yang nyaman tidak saja menjadi tren kampus elit dan berstandar internasional melainkan suatu keniscayaan bagi kampus pada umumnya agar suasana yang kondusif bagi siswa bisa berdampak positif pada capaian pembelajaran. Hampir semua kampus di US memberikan laporannya mengenai *safety guard dan annual security report*. Kebijakan keamanan di kampus beserta laporan yang harus dibuat di tiap tahunnya di US dilakukan berlandaskan pada kepatuhan Jeanne Clery Disclosure yang ditandatangani pada tahun 1990 dan menjadi aturan dari Federal yang harus dilaksanakan di US. Jeanne Clery Act, undang-undang perlindungan konsumen disahkan pada tahun 1990, mengharuskan semua perguruan tinggi dan universitas yang menerima dana federal untuk berbagi informasi tentang kejahatan di kampus dan upaya mereka untuk meningkatkan keselamatan kampus serta menginformasikan kepada publik kejahatan di atau sekitar kampus. Informasi ini dapat diakses publik melalui laporan keamanan tahunan universitas (Evansville, 2021).

Aturan yang mengikat pada kehidupan di kampus ini berlatar belakang pada bulan April 1986, kehidupan Jeanne Clerys berakhir tragis ketika siswa lain memperkosa dan membunuhnya di kamar asramanya. Khawatir akan kurangnya transparansi di sekitar kejahatan dan kekerasan di kampus-kampus, orang tua Jeanne, Connie dan Howard, berkomitmen untuk menciptakan perubahan agar kejadian yang menimpa keluarganya ini tidak terulang kembali.

Pada tahun 1990, Kongres menyetujui Undang-Undang mengenai Kesadaran akan Kejahatan dan Keamanan di Kampus. Untuk mengingat kejadian Jeanne ini, UU Jeanne Clery UU mulai berlaku pada tahun 1991. Hal-hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi adalah (Evansville, 2021) membuat catatan kejahatan publik, menerbitkan laporan keamanan tahunan yang mencakup statistik kejahatan dan kebijakan keamanan, memberikan peringatan tepat waktu untuk mahasiswa dan karyawan kampus tentang kejahatan yang memberikan ancaman langsung

atau berkelanjutan pada mahasiswa dan civitas kampus lainnya, dan menjamin hak-hak dasar tertentu bagi korban kekerasan seksual, kekerasan kencan, domestik kekerasan, dan menguntit.

Secara umum keamanan di kampus perguruan tinggi (PT) di Indonesia tidak mempunyai standar yang bisa dijadikan acuan. Sebagaimana akreditasi akademik yang sudah ada standarnya, pengelolaan keamanan di kampus PT masih belum menjadi jaminan bagi sivitasnya. Artinya keamanan bagi semua civitas yang memanfaatkan sarana dan prasarana di kampus PT belum menjadi kebutuhan yang ideal. Kalaupun ada PT yang mempunyai standar pengelolaan keamanan baik itu meliputi penjagaan keselamatan atau pengamanan harta milik baik milik kampus atau civitas yang itupun dilakukan karena kreativitas kampus yang bersangkutan bukan karena aturan yang mengahruskannya. Contoh yang ada di Indonesia adalah sistem pengelolaan keamanan yang ada di kampus Universitas Indonesia (UI). UI mencanangkan dan mendukung gerakan *Zero Crime Incidents Waste in UI* (UI, 2014).

Pihak UI sendiri mengeluarkan buku panduan teknis yang mengatur dan mengelola pengamanan di kampus UI ditujukan untuk civitas akademika UI maupun warga di luar UI yang ada di sekitar UI atau yang berinteraksi dengan UI. Buku panduan ini dapat membantu setiap warga kampus untuk lebih peduli dan mematuhi aspek ketertiban dan keamanan serta K3L. Diharapkan, setiap warga UI mau untuk melapor kepada petugas jika ada gangguan ketertiban atau keamanan di kampus UI sehingga dapat membantu terwujudnya UI yang tertib, aman, nyaman serta sehat dan selamat. Dengan adanya buku ini, kelancaran proses akademik akan menjadi lebih baik dan terwujudnya pencapaian *world class research university* serta mendukung peningkatan daya saing bangsa (Mustikasari, 2014).

Sementara itu berbagai PT ternama lainnya baik negeri atau swasta belum mempunyai standar pengelolaan keamanan di kampus. Ini semua tidak terlepas dari belum adanya aturan yang mengikat apakah itu oleh Polri ataukah peraturan dari Kemenristekdikti. Tidak jarang civitas akademika yang ada hanya mengeluh di media sosial tanpa ada tanggapan dan jalur yang jelas dalam memperoleh hak keselamatan jiwa atau keamanan hak milik pribadinya ketika di kampus.

Banyak kejadian yang ada di kampus PT di Indonesia yang menunjukkan fakta kurang atau bahkan tidak adanya sistem pengelolaan pengamanan di kampus. Bahkan pernah ada kejadian, menurut pengalaman peneliti sendiri, tahun 1990an mahasiswa UGM terlindas oleh biskota di kawasan jalanan di UGM sendiri. Kejahatan juga tidak menimpa hanya siswa domestik, tersiar kabar bahwa pelajar asing asal Malaysia diduga telah menjadi korban tindak pemerkosaan di Kampus Unpad. Karena itu, kampus Unpad dilabeli sebagai kampus “darurat kejahatan”. Terhitung Januari hingga Mei 2014, Polsek Jatinangor mencatat sudah ada 10 kejadian kriminal, mulai dari penjangbretan, penodongan hingga adanya pemerkosaan (Mustikasari, 2014). Bahkan di kampus UI sendiri yang notabene PT ternama dan teratas di

Indonesia ditengarai rawan terjadinya kriminalitas dalam narkoba (Darmawan, 2015). Di Kota Malang, kampus juga menjadi lahan target kriminalitas, Dari hasil penyelidikan dan pengembangan yang dilakukan anggota penyidik, terungkap dari kawanan penjahat yang ditangkap, DI dan HR, sedikitnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 58 unit sepeda motor. Dengan rincian pencurian di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) sebanyak tujuh kali, Universitas Negeri Malang (UM) sebanyak 11 aksi pencurian, di lingkungan kampus Universitas Brawijaya (UB) DI dan HOUR telah berhasil menyikat 33 motor, di kampus Universitas Islam Malang sebanyak lima kali, dan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang sebanyak tujuh motor yang berhasil mereka curi.

Kriminalitas juga banyak terjadi di kampus di luar Jawa, tercatat tujuh area kampus di Universitas Mulawarman (Unmul) yang paling sering terjadi aksi kejahatan di antaranya adalah . Walau masih ada tempat lainnya yang juga rawan, namun tujuh tempat ini yang mesti diberi perhatian lebih. Di antaranya, Gedung Fakultas Farmasi, tempat Rahmat dan Cahaya, dua mahasiswa yang menjadi korban penjahat. Atau Laboratorium Fakultas Pertanian, yang beberapa waktu lalu temboknya dijebol. Juga Masjid Al-Fatihah, yang merupakan sasaran empuk maling tas dan gadget (“Alasan Banyak Kejahatan, Masuk Kampus Unmul Nanti Bayar,” 2015)

Willingness to Pay (WTP) adalah suatu ukuran yang digunakan seperti halnya dalam teknik *Contingent Valuation* (CV) dan *Choice Experiment* (CE) untuk melihat seberapa besar nilai suatu manfaat dari sesuatu yang tidak ada nilai pasarnya (Hanley et al., 2001). Besaran ini penting penerapannya dalam mengukur besaran biaya seperti halnya konservasi dan manajemen kelangkaan dari suatu binatang (Hanley et al., 2001), WTP dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa masyarakat yang ada menganggap penting keberadaan binatang liar, angsa, dalam kehidupan di perdesaan. peningkatan kualitas air (Hite et al., 2002), pengurangan kriminalitas (Soeiro & Teixeira, 2010), penyambungan koneksi listrik (Abdullah & Jeanty, 2022), pengurangan *bullying* di sekolah (Persson & Svensson, 2013), bahkan untuk harga hedonis suatu produk (K. Bishop & Timmins, 2011) dan lain-lain.

Soeiro & Teixeira (2010) mengungkapkan bahwa siswa perempuan mempunyai WTP yang lebih besar dari laki-laki dalam mengurangi kejahatan. Mahasiswa dalam bidang tertentu mempunyai tingkat WTP yang signifikan berbeda dengan mahasiswa bidang lain. Mahasiswa dengan latar bidang ekonomi dan manajemen mempunyai tingkat WTP yang lebih besar daripada seni, olahraga, dan hukum. Bahkan kemampuan ini masih lebih kecil dibandingkan dengan mahasiswa bidang kesehatan.

Dalam penelitian dalam lingkup yang lebih luas yaitu Kota Yogyakarta, WTP untuk mengurangi kriminalitas di Kota Yogyakarta mahasiswa dari FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mempunyai besaran moneter paling sedikit WTPnya jika dibandingkan

dengan fakultas lainnya. Sedangkan fakultas lainnya yaitu FBS, PPS, FE, FIS, FT, dan FIK besar Rp WTPnya sama dengan FIP. Di mana mahasiswa dari FMIPA mempunyai WTP Rp 178.370 lebih rendah daripada mahasiswa FIP.

K. C. Bishop & Murphy (2011) mengungkapkan bahwa setiap individu sanggup memberikan \$472 untuk menghindari 10% kenaikan tingkat kejahatan. Selain itu diungkapkan bahwa dari total 100.000 penduduk yang ada, ada yang sanggup memberikan \$278,870 pertahunnya. Dalam penelitian yang lalu, peneliti menemukan bahwa WTP mahasiswa UNY untuk mengurangi kriminalitas di Kota Yogyakarta sendiri secara rata-rata adalah Rp144,984.60. (Ambrey et al., 2013) mengemukakan bahwa dari WTP yang didapatkan menunjukkan bahwa tindakan kriminal yang berkaitan dengan harta mengakibatkan kepuasan menikmati hidup berkurang. WTP percapita yang mampu dibayarkan pertahunnya \$1,236 di New South Wales.

Persson & Svensson (2013) menemukan bukti yang kuat dengan menemukan besarnya WTP dalam mengurangi tindakan *bullying*. WTP yang dihasilkannya menjadi info yang berguna bagi pemerintahnya dalam menentukan kebijakan untuk mengurangi tindakan *bullying* yang ada. Hal ini khususnya dikaitkan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat dalam meningkatkan pajak lebih yang dibayarkan dalam kegiatan program anti *bullying* ini.

Untuk konteks di Indonesia, besaran WTP ini sering dan banyak digunakan untuk melihat fenomena kerusakan lingkungan, kesanggupan untuk membayar suatu produk dan sebagainya (Joewono, 2009). Implementasi penggalan WTP untuk mengurangi kriminal sendiri kurang begitu dibahas. Padahal info ini sangatlah penting untuk diungkap karena semakin kompleksnya dan meningkatnya biaya kejahatan yang ada di Indonesia.

Kriminalitas mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian dan capaian hasil belajar. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka mengurangi kejahatan. Untuk langkah tersebut diperlukan informasi yang kompleks terlebih pada dampaknya yang sifatnya tidak mempunyai nilai pasar. Besaran WTP merupakan besaran yang digunakan dalam teknik CV untuk mendapatkan informasi yang penting tersebut. Pengungkapan WTP ini berguna untuk menjadi pertimbangan bagi pengambil kebijakan stakeholder internal UNY untuk mengurangi tingkat kejahatan khususnya yang berkenaan dengan kehidupan di Kampus UNY mahasiswa di Yogyakarta.

Garoupa (1997) melakukan penelitian tentang nilai moral dalam keseimbangan umum dalam menganalisis ekonomi terhadap suatu kriminalitas. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab kritik tentang tidak relevannya internalisasi norma-norma dalam mendukung kejujuran masyarakatnya. Secara teori sebagaimana yang diringkas oleh Cerro & Meloni (2000) dari berbagai sumber, efek jera diukur dengan seberapa banyak probabilitas orang yang ditahan dan divonis atau dilakukan isolasi oleh polisi dengan banyaknya polisi dan pengeluaran yang

digunakan untuk melakukan penegakan hukum. Selanjutnya yang efek sosial ekonomi ditimbulkan oleh dampak lingkungan sehingga pelaku cenderung melakukan kegiatan kriminal.

Ambrey et al. (2013) memberikan penekanan bahwa kriminalitas terjadi akibat kejadian kriminal masa lalu, penegakan hukum, dan kondisi ekonomi. Pada intinya berbagai variabel yang ada diperinci lebih jauh sebagai kontribusi terhadap kejadian kriminalitas baik yang sifatnya insentif maupun disinsentif ekonomi akan terjadinya kriminalitas. Brand & Price (2000) mengemukakan bahwa biaya yang bisa dihitung terkait dengan tindak criminal antara lain biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya tersebut menjadi satu yang dikenal dengan konsep *social cost of crime*. Biaya ini meliputi biaya pertama adalah *cost in anticipation of crime* yang terdiri atas pengeluaran keamanan dan pengeluaran untuk asuransi. Yang kedua, *cost as consequence of crime*, yang terdiri atas harta material yang rusak atau hilang, hilangnya produktifitas, dampak bagi emosi dan fisik akibat kriminalitas, layanan korban, dan layanan kesehatan. Selanjutnya adalah *cost in response to crime*, biaya ini meliputi biaya yang dikeluarkan dalam system peradilan criminal termasuk di dalamnya biaya penegakan hukum oleh polisi.

Konsep biaya social direvisi oleh (Dubourg et al., 2005). Perbaikan ini meliputi kalkulasi biaya criminal yang terjadi pada individu, kalkulasi pada system peradilan khususnya dalam penentuan hukuman, multiplier dalam menghitung volume criminal, serta dimasukkannya data yang lebih *up date* dalam penghitungan biaya social ini. Dampak yang besar dalam revisi penghitungan ini adalah berkurangnya biaya yang mengakibatkan tercederanya korban (baik fisik maupun psikis) serta meningkatkan biaya akibat criminal selain hal tersebut. Biaya kesehatan dan produktifitas yang hilang juga semakin meningkat akibat revisi ini.

Kepatuhan untuk membuka data kriminalitas yang dijalankan di PT di US berdasarkan hukum Clery Act. Aturan ini mengharuskan kampus PT di US agar (Purba, 2018) menerbitkan laporan tahunan setiap tahun setiap tanggal 1 Oktober yang berisi tiga tahunan statistik kejahatan dan keselamatan kebakaran di kampus serta pernyataan kebijakan keamanan kampus; mengungkapkan statistik kejahatan untuk kampus, tempat umum berbatasan langsung dengan atau berjalan melalui kampus, dan fasilitas non kampus tertentu dan ruang kelas jarak jauh. Statistik tersebut harus dikumpulkan dari polisi atau pihak keamanan kampus, penegak hukum setempat, dan yang lainnya seperti pejabat universitas yang memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk kegiatan siswa dan kampus; memberikan "peringatan tepat waktu" terhadap adanya kejahatan-kejahatan yang telah terjadi dan ancaman yang sedang berlangsung bagi mahasiswa dan karyawan; mengeluarkan pemberitahuan darurat, setelah konfirmasi kedaruratan yang signifikan atau situasi berbahaya yang melibatkan ancaman langsung terhadap kesehatan atau keselamatan siswa atau karyawan terjadi di kampus; mengungkapkan dalam kejahatan publik log "kejahatan yang terjadi di kampus atau dalam patroli yurisdiksi polisi kampus atau

departemen keamanan kampus dan dilaporkan ke polisi kampus atau keamanan departemen" dan mempertahankan dalam kebakaran publik log catatan setiap kebakaran yang terjadi dalam fasilitas perumahan untuk mahasiswa di kampus.

Kepatuhan terhadap Clery Act tidak melanggar Hak Pendidikan Keluarga dan Privasi Act (FERPA) atau hukum lainnya. Setiap siswa, staf, atau anggota fakultas yang melaporkan kejahatan atau terlibat dalam setiap aspek kepatuhan di bawah Clery Act dilindungi oleh hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap berapa besar WTP dari mahasiswa ekonomi untuk mengurangi kriminalitas yang ada di Kampus FE UNY. Lebih dari itu, penelitian juga ditujukan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang menentukan besarnya WTP. Selain itu penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi sistem pengelolaan keselamatan jiwa dan keamanan hak milik di Kampus FE UNY.

METODE

Data yang digunakan diperoleh dari sampel dengan metode pengambilan *purposive proportional sampling* dari populasi mahasiswa FE UNY di Kampus Karang Malang. What is the reason choosing FE UNY as respondent? It should be explained. Dengan menggunakan instrument kuesioner yang mengadopsi *Contingent Valuation Method*, kita bisa mendapatkan kemampuan membayar para responden untuk mengurangi tingkat kriminalitas yang diekspresikan melalui jawabannya dalam survey yang dilakukan. Berdasarkan (II et al., 2001), jumlah sampel yang dibutuhkan dari mahasiswa FE UNY sejumlah 2,299 (terdaftar di semester genap 2014/2015) dalam penelitian ini adalah sebanyak 119 untuk tingkat kesalahan 5% atau 209 untuk tingkat kesalahan yang diinginkan 1%. Diambil sampel sebanyak 300 mahasiswa mengingat metode yang digunakan yaitu menggunakan model ordered probit.

Pendekatan ekonometrika digunakan untuk mengetahui pengaruh berbagai faktor determinan WTP itu sendiri. Studi eksplorasi digunakan untuk mengetahui sistem pengamanan jiwa dan hak milik civitas akademik FE UNY. Model yang digunakan untuk membentuk fungsi WTP diadopsi dan dimodifikasi dari Soeiro dan Teixeira (2010) dapat dideskripsikan sebagaimana fungsi berikut ini:

$$WTP = f(I_i, SOSEC_i, EXP_i, CONCAM_i, COSTCR_i) \quad (1)$$

Selanjutnya fungsi tersebut dibuat dalam model ekonometri:

$$WTP = \alpha + \beta_1 I_i + \beta_2 SOSEC_i + \beta_3 EXP_i + \beta_4 CONCAM_i + \beta_5 COSTCR_i \dots \dots (2)$$

$$WTP_{cat} = \alpha + \beta_1 I_i + \beta_2 SOSEC_i + \beta_3 EXP_i + \beta_4 CONCAM_i + \beta_5 COSTCR_i \dots \dots (3)$$

Kedua persamaan inilah yang dijadikan dua model estimasi dalam menentukan faktor penentu WTP. Sedangkan model ke-3 adalah model (3) yang diestimasi menggunakan metode *maximum likelihood* dengan model ordered probit.

Lebih terperinci, variabel yang dipakai dalam model tersebut adalah:

- WTP : *willingness to pay*, seberapa besar kesanggupan dari responden mampu membayar dalam rangka untuk mengurangi kriminalitas.
- Ii : berbagai karakteristik internal seperti umur, prodi asal, jenis kelamin.
- SOSECi : berbagai faktor sosial ekonomi seperti pendapatan bulanan keluarga, uang saku bulanan, ketergantungan finansial, dan tingkat pendidikan kepala keluarga.
- EXPi : berbagai faktor berkaitan dengan kriminalitas yang menimpa seperti, korban kriminalitas, pelaku kriminalitas, waktu kejadian.
- CONCAMi : berbagai kondisi keamanan kampus seperti halnya kondisi geografis, kondisi infrastruktur keamanan kampus, kondisi layanan keamanan, tingkat kepercayaan keamanan kampus.
- COSTCRi : berbagai faktor berkaitan dengan biaya kejahatan seperti kerusakan fisik dan psikologi yang dialami, biaya langsung dan tidak langsung yang dialami, kepatuhan terhadap pajak, biaya nyata untuk mengantisipasi kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data dan Besaran WTP

Berdasarkan data yang dihimpun dari 300 mahasiswa sebagai sampel dalam penelitian ini, maka dapat disusun deskripsi data sebagaimana berikut tabel 4.1 ini.

Tabel 1. Deskripsi Data Berdasarkan Kategori yang Ada

TOTAL RESPONDEN 300 MAHASISWA	N	%
JENIS KELAMIN		
LAKI-LAKI	95	31.67
PEREMPUAN	205	68.33
PENDAPATAN ORTU		
Kurang dari Rp1.2juta	51	17.00
Rp1.2juta sd <Rp2juta	60	20.00
Rp2juta sd <Rp3juta	62	20.67
Rp3juta sd <Rp5juta	88	29.33
Rp5juta sd <Rp10juta	35	11.67
Rp10juta ke atas	4	1.33
UANG SAKU PER BULAN		
Kurang dari Rp500ribu	128	42.67

Rp500ribu sd <Rp750ribu	109	36.33
Rp750ribu sd <Rp1juta	42	14.00
Rp1juta sd <Rp1.5juta	15	5.00
Rp1.5juta sd <Rp2juta	5	1.67
Rp2juta ke atas	1	0.33
STATUS KETERGANTUNGAN FINANSIAL		
Bergantung pada kiriman keluarga	205	68.33
Banyak bergantung namun punya penghasilan sendiri	59	19.67
Bergantung namun lebih banyak pada penghasilan sendiri	15	5.00
Mandiri	21	7.00
PENDIDIKAN ORANG TUA		
Tidak lulus SD	6	2.00
SD	36	12.00
SMP	44	14.67
SMA	138	46.00
DIPLOMA	12	4.00
S1	48	16.00
S2	13	4.33
S3	3	1.00
PERNAH MENJADI KORBAN KRIMINALITAS		
Ya	70	23.33
Tidak	230	76.67
TYPE KRIMINALITAS YANG PERNAH MENIMPA		
NON PROPERTY CRIME		
A1 Intimidasi	4	3.81
A2 Percobaan pembunuhan	0	0.00
A3 Kejahatan seksual	0	0.00
A4 Penyerangan	0	0.00
A5 Lainnya yg tdk disebutkan	29	27.62
PROPERTY CRIME		
B1 Perampokan	0	0.00
B2 Pencurian barang'	64	60.95
B3 Pencurian Kendaraan Bermotor	0	0.00
B4 Perusakan barang pribadi	6	5.71
B5 Lainnya yang tidak disebutkan	2	1.90
PELAKU KRIMINAL		
a. Orang asing	64	90.14
b. Kenal tapi tidak dekat	4	5.63
c. Teman dekat	1	1.41
d. Pegawai out sourcing	1	1.41
e. Karyawan/admin	1	1.41
f. Dosen	0	0.00
g. Sebutkan jika ada yang lain belum disebutkan.	0	0.00

KAMPUS FE AMAN DIPANDANG SISI GEOGRAFIS		
Sangat tidak setuju	8	2.67
Tidak setuju	73	24.17
Netral	102	34.00
Setuju	111	36.83
Sangat setuju	7	2.33
KAMPUS FE AMAN DIPANDANG SISI SARANA DAN PRASARANA		
Sangat tidak setuju	19	6.22
Tidak setuju	77	25.56
Netral	89	29.78
Setuju	109	36.22
Sangat setuju	7	2.22
KAMPUS FE MEMPUNYAI LAYANAN KEAMANAN YANG SUDAH BAIK		
Sangat tidak setuju	7	2.33
Tidak setuju	59	19.61
Netral	115	38.22
Setuju	113	37.56
Sangat setuju	7	2.28
MAHASISWA MEMPUNYAI KEYAKINAN BAHWA KAMPUS FE AMAN SECARA UMUM		
Sangat tidak setuju	9	2.93
Tidak setuju	73	24.47
Netral	90	30.07
Setuju	115	38.47
Sangat setuju	12	4.07
KERUSAKAN FISIK AKIBAT KRIMINALITAS		
0 Belum pernah	298	99.33
Cedera ringan	0	0.00
Cedera moderat	2	0.67
Cedera berat	0	0.00
KERUSAKAN PSIKIS AKIBAT KRIMINALITAS		
0 Belum pernah	295	98.33
Cedera ringan	4	1.33
Cedera moderat	1	0.33
Cedera berat	0	0.00
BESARAN WTP UNTUK MENGURANGI KRIMINALITAS		
(1) Tidak mau	79	26.33
(2) Kurang dari Rp600ribu	212	70.67
(3) Rp600ribu sd <Rp1.2juta	7	2.33
(4) Rp1.2juta sd <Rp2juta	1	0.33
(5) Rp2juta sd <Rp3juta	0	0.00
(6) Rp3juta sd <Rp5juta	0	0.00

(7) Rp5juta sd <Rp10juta	1	0.33
(8) Rp10juta ke atas	0	0.00
KEMAUAN MEMBAYAR JIKA DIMASUKKAN SEBAGAI KEWAJIBAN PAJAK		
Saya tidak mau membayar	84	28.00
Saya akan membayar kurang dari yang ditentukan	58	19.33
Saya akan membayar dengan besaran yang sama	157	52.33
Saya akan membayar lebih dari yang ditentukan	1	0.33

Jenis kelamin responden yang terbanyak adalah wanita yaitu sejumlah 68.33%. Hal ini semua sesuai dengan populasi mahasiswa yang ada di FE UNY. Berdasarkan sosio ekonomi mahasiswa FE UNY, memang terlihat dalam tabel bahwa responden yang ada terdiri dari mahasiswa dengan strata ekonomi menengah ke bawah, di mana ortu mahasiswa yang berpenghasilan lebih dari Rp10juta hanya 1.33% responden yang ada. Hal ini juga tercermin dalam uang saku responden yang paling banyak berada pada kisaran kurang dari Rp750rb. Mayoritas mahasiswa terdiri atas mahasiswa yang dari sisi finansialnya masih bergantung pada ortu, yaitu sebesar 68.33%. Pendidikan ortu mayoritas dari lulusan SMA yaitu 46%, hanya sekitar 25% ortu mahasiswa berasal dari pendidikan tinggi.

Berdasarkan pengalaman tentang kriminalitas, hanya 70 mahasiswa atau 23% responden yang mengalami korban kriminalitas. Hanya saja dari responden yang diteliti mereka mengalami kriminalitas sebanyak 105. Ini artinya bahwa setiap mahasiswa yang menjadi korban ada yang mengalami lebih dari satu kali atau satu jenis kriminalitas. Dari jenis kriminalitas, 31% mengalami kriminalitas sifatnya non ekonomi sedangkan sisanya kriminalitas ekonomi. Sebagian besar pelaku kriminalitas adalah orang asing, yaitu 90%.

Dari sisi kondisi keamanan kampus, semua faktor yang ada yaitu persepsi keamanan kampus dari sisi geografis, dari sisi sarpras, layanan sistem keamanan, maupun tingkat keyakinan mahasiswa terhadap keamanan, menunjukkan kecenderungan nilai tengah. Artinya bahwa mahasiswa mempunyai persepsi netral, antara setuju dan tidak setuju terhadap semua persepsi keamanan yang ada.

Dari sisi biaya kriminalitas, hanya sebagian kecil saja yang mengalami kerusakan fisik atau psikis, ini terjadi karena kriminalitas yang terjadi sebagian besar kriminalitas sifatnya ekonomi. Biaya rata-rata yang dialami mahasiswa akibat kriminalitas secara langsung adalah sekitar Rp 91.000 sedangkan biaya tidak langsung adalah sekitar Rp 1.300. Biaya yang digunakan untukantisipasi kejahatan adalah sebesar untuk Rp 83.600 untuk investasi awal saja sedangkan untuk biaya perawatan adalah Rp 26.900 tiap bulannya.

Besaran WTP yang didapatkan adalah Rp 106.400 secara rata-rata, di mana WTP yang tertinggi yang dikehendaki adalah Rp5.500.000. Jika ditetapkan bahwa besaran biaya kriminal menjadi pajak maka sebagian besar yaitu 52% mahasiswa bersedia untuk membayar pajak dengan nominal yang sesuai dengan besaran yang ditetapkan. Dengan data tersebut maka nominal yang dapat dikumpulkan adalah sebesar minimal Rp 244.600.000 dengan asumsi mahasiswa FE UNY sejumlah 2299 mahasiswa.

Berbagai Masukan tentang Kondisi Keamanan

Tentang kondisi geografis FE UNY, masukan yang didapatkan adalah sebagian besar menyatakan bahwa sebaiknya parkir diperluas yaitu sebanyak 15.6%. Selanjutnya ada yang memberi masukan bahwa penataan kampus agar lebih baik lagi (13%), lokasi disterilkan dari warga (9.4%), batasan kampus dan permukiman jelas (8%), lingkungan nyaman (6%) dan sebagainya. Masukan lainnya adalah tambah penjaga keamanan, orang asing wajib lapor, tidak ada cctv, dan pengurangan pintu masuk.

Untuk meningkatkan keamanan Kampus FE UNY Karang Malang dari sisi sarana prasarana, responden memberikan beberapa masukan di mana yang terbanyak adalah memberi masukan 14%. Selanjutnya masukan yang paling banyak diutarakan antara lain diadakan CCTV di area parkir (11%), dilakukan perbaikan area parkir (11%), ditingkatkan disiplin (11%) serta berbagai masukan lainnya. Masukan lainnya adalah menambah petugas keamanan, CCTV diperbaiki, pemberian atap parkir, menggunakan kartu paker, ada parkir terpusat, CCTV diperbanyak. Tentang layanan keamanan yang dimiliki oleh Kampus FE UNY berupa ketersediaan satpam, masukan yang diberikan paling banyak di antaranya adalah agar kinerja satpam ditingkatkan lagi 49% dan jumlah personilnya agar ditambah 40%. Ini artinya diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas satpam menurut mahasiswa.

Dari sisi patroli keamanan, masukan yang didapatkan antara lain agar dilakukan pengawasan lebih (60%), peningkatan kualitas dan kuantitas patroli (19%). Ini artinya pengawasan yang dilakukan dengan patroli agar lebih ditingkatkan intensitasnya. Tentang layanan pengantaran baik oleh satpam dan sistem keamanan misalnya teman dll banyak masukan yang didapatkan. Sistem pengantaran ini memang belum diterapkan hal ditunjukkan dengan banyaknya masukan sebesar 63% yang menyatakan bahwa sistem ini perlu diadakan. Pengantaran yang sudah ada yang dilakukan oleh satpam agar ditingkatkan kinerjanya karena memang belum tersistem (31%).

Selama ini memang belum pernah ada pendidikan sistem keamanan, ada banyak masukan mengenai hal ini. Responden banyak yang mendukung pengadaan ini yaitu 81% dan perlu disosialisasikan yaitu 9%. Masukan lainnya antara lain minimal diadakan 1 tahun sekali (4%),

diadakan saat ospek (3%), satpam diikutkan (2%), serta agar diadakan kotak saran. Nomor telepon darurat memang belum ada di FE UNY. Responden banyak yang mendukung tentang hal ini, dimana 92% masukan yang masuk mendukung agar ada no telp darurat. Ini artinya perlu sekali diadakan telp darurat di FE UNY.

Masukan lainnya yang muncul dalam rangka peningkatan keamanan di kampus FE UNY adalah pemasangan CCTV (56%), pengadaan parkir terpadu (10%), menambah karyawan untuk menjaga parkir (8%), peningkatan pemanfaatan CCTV (5%), kemananan parkir ditingkatkan (5%), dan peningkatan keamanan di semua area (5%). Selain itu banyak masukan yang dihimpun antara lain pagar ditinggikan, lampu penerangan parkir, sharing antara dosen dan mahasiswa, dan lain-lain. Upaya tambahan yang dilakukan oleh responden sebagai tindakan nyata bahwa mereka mengeluarkan biaya untuk mengurangi kriminalitas di Kampus FE UNY. Upaya tambahan tersebut adalah menambah kunci pengaman (62%), mengikuti latihan self defense (23%), dan membawa alat keamanan pribadi seperti spray lombo, pistol kejut, dll (15%). Sebagaimana dikemukakan dalam data sebelumnya bahwa upaya ini dikeluarkan dengan biaya rata-rata sebesar Rp83.55rb untuk instalasinya bahkan biaya terbanyak yang dikeluarkan oleh responden adalah Rp Rp1.35jt. Sedangkan biaya untuk biaya bulanan yang dikeluarkan sebesar Rp26.92rb dengan biaya maksimum yang dikeluarkan sebesar Rp600rb.

Selain upaya yang disebutkan sebelumnya, upaya lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa untuk meningkatkan keamanan di Kampus FE UNY adalah berhati-hati dengan aset pribadi (18%), berdoa (16%), waspada (16%), menghindari tempat rawan (10%), dan membawa gunting kuku/penggaris besi (8%). Banyak upaya lainnya yang disebutkan oleh responden seperti halnya tidak sendirian, membawa helm sendiri, tidak pulang malam dan lain sebagainya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat WTP untuk Mengurangi Kriminalitas di Kampus

Levitt (2004) mengungkap bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penurunan kriminalitas. Berbagai faktor tersebut antara lain 1).meningkatnya jumlah polisi, 2).meningkatnya populasi orang yang dipenjarakan, 3).terjadinya resesi epidemik dari kokain, dan 4).legalisasi dari aborsi. Banyak analisis empiris yang menyatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara dilegalkannya aborsi dengan menurunnya kriminalitas. Lebih jauh adanya aturan ini menghasilkan outcome yang lebih luas antara lain berkurangnya kematian bayi, turunnya *single parents*, dan berkurangnya penggunaan obat-obatan.

Ada enam faktor utama yang secara teori sangat kuat namun dalam tataran nyata atau praktis tidak menunjukkan perannya dalam menurunkan kriminalitas (Levitt, 2004). Berbagai faktor utama tersebut antara lain 1). Penguatan Ekonomi Tahun 1990an, 2). Perubahan Demografi, 3). Strategi Kebijakan yang Lebih Baik, 4). Tata Aturan dalam Pengontrolan Senjata,

5). Tata Aturan dalam Pengontrolan Senjata, dan 6). UU yang Mengizinkan Penggunaan Senjata Tersembunyi, dan 7). Meningkatkan Penggunaan Hukuman Mati.

Dalam pengembangan sosial, berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam rangka pencegahan terjadinya kriminalitas adalah tekanan keluarga, pengabaian diri, pengabaian, kemiskinan, seksual fisik dan pelecehan, penyalahgunaan obat dan alkohol, kondisi hidup yang buruk, pengalaman anak usia dini, pengangguran, serta rendahnya pendidikan dan buta huruf. Pembangunan sosial memberikan pendekatan yang komprehensif untuk pencegahan kejahatan. Berbagai faktor bekerja dengan dukungan sektor penegakan hukum tradisional yang ada seperti kepolisian, pengadilan, dan serta pihak yang melakukan koreksi (peradilan yang lebih tinggi atau MA di Indonesia) serta juga perlunya hubungan di luar sektor peradilan tradisional pidana tersebut. Berbagai hal yang tidak boleh diabaikan kepentingannya adalah kebijakan, program, dan layanan seperti perumahan sosial, pendidikan, kesehatan, jaminan pendapatan dan pelayanan sosial yang berperan dalam mencegah kejahatan (Purba, 2018).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Buonanno & Montolio (2008), faktor yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas terbagi atas tiga aspek utama yaitu variabel untuk penjeratan terhadap kriminalitas, variabel sosiodemografi, dan variabel sosioekonomi. Variabel penjeratan ini menentukan kembalian harapan terhadap pelaksanaan kriminalitas. Variabel sosiodemografi yang dimasukkan adalah presentasi usia produktif laki-laki (15-29), porsi penduduk yang tinggal di kota provinsi, dan porsi penduduk asingnya. Sedangkan variabel sosioekonomi antara lain GDP perkapita, pertumbuhan GDP, tingkat pengangguran, serta porsi penduduk yang mengenyam pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi.

Dari sisi faktor sosioekonomi mahasiswa, variabel pendapatan bulanan keluarga dan pendidikan kepala keluarga mempengaruhi tingkat WTP mahasiswa dalam mengurangi kriminalitas di Kampus FE UNY Karang Malang. Keduanya menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan bulanan keluarga maka semakin tinggi tingkat WTP mahasiswa begitu juga sama halnya dengan tingkat pendidikan kepala keluarga mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosial ekonomi keluarga mahasiswa semakin tinggi tingkat WTP mahasiswa.

Dari sisi faktor pengalaman kejadian kriminalitas, faktor korban (VICTIM) dan pelaku juga mempengaruhi tingkat WTP mahasiswa. Mahasiswa yang mengalami sebagai korban kriminalitas di Kampus FE UNY mempunyai WTP yang lebih besar daripada WTP nonkorban. Jika pelaku kriminalitas adalah pegawai di FE UNY (OFF), mahasiswa sebagai korban mempunyai tingkat WTP yang lebih besar dibanding jika pelakunya adalah pihak lain.

Dari sisi faktor kondisi keamanan di Kampus FE UNY, faktor tersebut terdiri atas variabel-variabel yaitu kondisi geografis kampus (GEOCON), kondisi sarana dan prasarana kampus (INFCON), layanan keamanan (SECSERV), dan keyakinan akan tingkat keamanan di

Kampus FE UNY (SAFBELIEFS). Dari berbagai variabel tersebut tidak ada satupun yang mempengaruhi besarnya WTP mahasiswa. Ini kemungkinan besar terjadi karena mahasiswa memang menyandarkan sepenuhnya keamanan kampus pada pihak kampus sehingga sudah semestinya menjadi kewajiban kampus untuk menyediakan keamanan yang baik di Kampus FE UNY.

Berdasarkan berbagai faktor mengenai biaya kejahatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa cedera fisik dan cedera psikis terbukti mempengaruhi besarnya WTP mahasiswa. Semakin besar cedera fisik yang pernah diderita semakin besar tingkat WTP yang dimiliki oleh mahasiswa. Sebaliknya semakin besar tingkat cedera psikis yang pernah diderita mahasiswa maka semakin kecil WTP mahasiswa. Ini bisa terjadi karena mahasiswa yang mengalami cedera psikis cenderung menyalahkan kondisi yang ada sehingga dia tidak mau berkontribusi lebih banyak malah justru merendahkan kontribusinya. Selain itu, faktor tingkat ketaatan pajak (TAXCAT) dan tindakan nyata berupa biaya pemasangan alat untuk pencegahan kriminalitas (REVINST) berpengaruh positif terhadap tingkat WTP mahasiswa. Semakin taat mahasiswa terhadap pajak maka semakin besar WTP yang dikehendaki, hal ini dikuatkan dengan biaya riil yang dikeluarkan selama ini.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagaimana berikut. WTP mahasiswa FE UNY untuk mengurangi kriminalitas yang ada di kampus FE UNY adalah sebesar Rp 106.400 secara rata-rata di mana WTP yang terbesar adalah Rp5.5juta. Besaran ini nilai cukup tinggi dibanding penelitian relevan yang ada. Dengan demikian, ada potensi dana yang terkumpul dari mahasiswa ekonomi sejumlah Rp 244.000.000 per tahunnya untuk digunakan dalam rangka meningkatkan keamanan agar kriminalitas berkurang. Faktor Sosio Ekonomi yang mempengaruhi tingkat WTP mahasiswa adalah di pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan kepala keluarga. Keduanya berpengaruh positif, ini artinya bahwa mahasiswa dari tingkat ekonomi yang mapan dan melek pendidikan mempunyai WTP yang cenderung tinggi.

Faktor pengalaman kriminalitas yang pernah diterima menunjukkan bahwa mempengaruhi tingkat WTP mahasiswa adalah status korban dan pelaku kriminalitas itu sendiri. Korban kriminalitas mempunyai tingkat WTP yang lebih tinggi daripada yang tidak pernah mengalami kriminalitas. Jika pelaku kriminalitas adalah pegawai maka mahasiswa mempunyai WTP yang lebih tinggi. Faktor kondisi keamanan dan layanan keamanan di kampus sama sekali tidak mempengaruhi tingkat WTP mahasiswa. Berdasarkan berbagai faktor biaya kejahatan, kerusakan fisik dan kerusakan psikis yang dialami mahasiswa mempengaruhi tingkat WTP. Hanya saja kerusakan psikis berpengaruh negatif terhadap besarnya WTP yang ada. Selain itu

tingkat ketaatan ketika biaya kriminalitas menjadi pajak serta tindakan nyata untuk mengantisipasi kejahatan juga mempengaruhi tingkat WTP di mana pengaruh keduanya positif. Kedua faktor ini sejalan dalam mempengaruhi WTP, di mana orang yang semakin taat pajak dan semakin besar pengeluaran antisipasi kejahatan mempunyai WTP yang semakin tinggi. Artinya mahasiswa mempunyai konsekuensi yang tinggi dalam menanggung biaya agar kriminalitas berkurang di FE UNY.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Jeanty, P. W. (2022). Demand for Electricity Connection in Rural Areas: The case of Kenya. In *Bath Economics Research Papers* (Issue 26). <https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/327336/2609.pdf>
- Alasan Banyak Kejahatan, Masuk Kampus Unmul Nanti Bayar. (2015). *Pro Kalimantan Timur*. Pro Kaltim
- Ambrey, C. L., Fleming, C. M., & Manning, M. (2013). The life satisfaction approach to estimating the cost of crime: An individual's willingness-to-pay for crime reduction. In *Griffith Business School Discussion Papers Economics No. 2013-01*. https://melbourneinstitute.unimelb.edu.au/assets/documents/hilda-bibliography/working-discussion-research-papers/2013/Ambrey_et_al_-the-life-satisfaction-approach-to-estimating-the-cost-of-crime.pdf
- Bishop, K. C., & Murphy, A. D. (2011). Estimating the willingness to pay to avoid violent crime: A dynamic approach. *American Economic Review*, 101(3), 625–629. <https://doi.org/10.1257/aer.101.3.625>
- Bishop, K., & Timmins, C. (2011). Hedonic Prices and Implicit Markets : Estimating Marginal Willingness to Pay for Large by. *NBER Working Papers*, 17611, 1–73.
- Brand, S., & Price, R. (2000). *The Economic and Social Costs of Crime* (Issue January). Home of Research Study. https://www.researchgate.net/publication/247849478_The_Economic_and_Social_Costs_of_Crime_-_Home_Office_Research_Study_217
- Buonanno, P., & Montolio, D. (2008). Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces. *International Review of Law and Economics*, 28(2), 89–97. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2008.02.005>
- Burdick-Will, J. (2013). School Violent Crime and Academic Achievement in Chicago. *Sociology of*

- Education*, 86(4), 343–361. <https://doi.org/10.1177/0038040713494225>
- Cerro, A. M., & Meloni, O. (2000). Determinants of the Crime Rate in Argentina During The 90s. *Estudios de Economía*, D(27). https://www.researchgate.net/publication/23692384_Determinants_of_the_crime_rate_in_Argentina_during_the_'90s
- Darmawan, Z. (2015, April). Kampus UI Rentan Kejahatan, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak. *Viva*. https://www.viva.co.id/berita/metro/611522-kampus-ui-rentan-kejahatan-polisi-kerahkan-anjing-pelacak?page=all&utm_medium=all-page
- Dubourg, R., Hamed, J., & Thorns, J. (2005). The economic and social costs of crime against individuals and households 2003 / 04. In *Home office online report 30/05*. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/191498/Green_Book_supplementary_guidance_economic_social_costs_crime_individuals_households.pdf
- Evansville, U. of. (2021). *Annual Security And Fire Safety Report*. University of Evansville. https://www.ehs.harvard.edu/sites/ehs.harvard.edu/files/heoa_annual_fire_safety_report_2017_0.pdf
- Garoupa, N. (1997). The role of moral values in the economic analysis of crime: A general equilibrium approach. *Universitat Pompeu Fabra Economics Working Paper*, 245, 22.
- Hanley, N., Wright, R., MacMillan, D., & Philip, L. (2001). *Willingness to pay for the conservation and management of wild geese in Scotland*. 49.
- Hite, D., Hudson, D., & Intarapapong, W. (2002). Willingness to pay for water quality improvements: The case of precision application technology. *Journal of Agricultural and Resource Economics*, 27(2), 433–449. <https://doi.org/10.22004/ag.econ.31120>
- II, J. E. B., Kotrlík, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Determining appropriate sample size in survey research. *Information Technology, Learning, and Performance Journal*, 19(1), 43–50. <https://www.opalco.com/wp-content/uploads/2014/10/Reading-Sample-Size1.pdf>
- Indrawan, A. (2015). Polisi Temukan Barang Diduga Milik Pembunuh Mahasiswa UI. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/nyxpt7365/polisi-temukan-barang-diduga-milik-pembunuh-mahasiswa-ui>
- Jeritan Mahasiswa Indonesia di Singapura. (2009). *Kompas*.
- Joewono, T. (2009). Exploring the Willingness and Ability to Pay for Paratransit in Bandung, Indonesia. *Journal of Public Transportation*, 12(2), 85–103. <https://doi.org/10.5038/2375->

0901.12.2.5

- Lacoe, J. (2020). Too Scared to Learn? The Academic Consequences of Feeling Unsafe in the Classroom. *Urban Education*, 55(10), 1385–1418. <https://doi.org/10.1177/0042085916674059>
- Levitt, S. D. (2004). Understanding why crime fell in the 1990s: Four factors that explain the decline and six that do not. *Journal of Economic Perspectives*, 18(1), 163–190. <https://doi.org/10.1257/089533004773563485>
- Mustikasari, T. (2014). Kejahatan di Kampus: Apa Penyebabnya? *Sosialnews.Com*.
- Persson, M., & Svensson, M. (2013). The willingness to pay to reduce school bullying. *Economics of Education Review*, 35, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2013.02.004>
- Purba, M. L. (2018). Munich Personal RePEc Archive. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 2(35423), Paper No. 40041, posted 17.
- Schunk, D. H. (2012). Learning Theories An Educational Perspective. In Central Publishing (Ed.), *Nature* (6th ed., Vol. 322, Issue 6078). The University of North Carolina at Greensboro. <https://doi.org/10.1038/322399b0>
- Soeiro, M., & Teixeira, A. A. C. (2010). Determinants of higher education students' willingness to pay for violent crime reduction: a contingent valuation study. In *FEP Working Paper No. 384*.